KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Sains Student Research (JSSR)
Vol.5, No.1 Februari 2027
e-ISSN: 3025-9851, p-ISSN : 3025-986X, Hal 373-388
DOI : https://doi.org/10.61722/jssr.v5i1.13599

Strategi Manajemen Keuangan Digital dalam Meningkatkan Keberlanjutan UMKM: Integrasi Arus Kas, Literasi Keuangan, dan Pengendalian Internal

Aqilah Syahira[1], Muh. Farhat Jibril Abdullah[2],Nurul Syafigah[3], Andi Muhammad Rivai[4]
[1-4]Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
Korespondensi Penulis: andi.rivai@unm.ac.id

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in Indonesia's economy, but their sustainability is often hampered by limited capital, inconsistent bookkeeping, unstable cash flows, and uneven risk-management capabilities. This study examines digital-based financial management strategies for supporting MSME sustainability by integrating cash-flow management, financial literacy, budgeting, and internal control. It uses a descriptive qualitative approach with a literature review. The secondary data come from scholarly articles, official institutional publications, accounting standards, regulations, and established conceptual frameworks, which were reviewed through identification, thematic categorization, comparison, synthesis, and conclusion drawing. The review suggests that digital tools can help MSMEs record transactions, keep payment evidence, organize financial information, and make timely decisions. However, these benefits do not come automatically. They still depend on the users' ability to interpret financial information, verify transactions, protect their accounts, and keep records consistently. The study proposes several practical steps: separating personal and business finances, recording transactions regularly, preparing cash-flow projections and budgets, reconciling digital payments, limiting account access, backing up data, and evaluating financial performance periodically. Integrating these practices can strengthen financial resilience and support the continuity of MSME operations.*
Keywords: *Financial Management; MSMEs; Digital Financial Management; Cash Flow; Financial Literacy; Internal Control; Business Sustainability.*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, keberlanjutannya masih terhambat oleh beberapa masalah, misalnya modal yang terbatas, pencatatan keuangan yang belum konsisten, arus kas yang tidak stabil, dan kemampuan mengelola risiko yang berbeda-beda antarpelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi manajemen keuangan digital untuk mendukung keberlanjutan UMKM, dengan memadukan pengelolaan arus kas, literasi keuangan, perencanaan anggaran, dan pengendalian internal. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data sekunder dikumpulkan dari artikel ilmiah, publikasi lembaga resmi, standar akuntansi, peraturan, dan kerangka konseptual yang relevan, lalu dianalisis lewat tahap identifikasi, pengelompokan tema, perbandingan, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi digital dapat membantu mempercepat pencatatan transaksi, menyimpan bukti pembayaran, menata informasi keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan. Meski begitu, manfaat tersebut tidak muncul dengan sendirinya, sebab tetap bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam memahami informasi keuangan, memeriksa transaksi, menjaga keamanan akun, dan mencatat secara konsisten. Strategi yang disarankan mencakup pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan transaksi secara rutin, penyusunan proyeksi arus kas dan anggaran, rekonsiliasi pembayaran digital, pembatasan akses akun, pencadangan data, dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala. Jika praktik-praktik ini dijalankan bersama, ketahanan keuangan UMKM dapat menguat dan operasionalnya lebih terjaga.
Kata Kunci: *Manajemen Keuangan; UMKM; Manajemen Keuangan Digital; Arus Kas; Literasi Keuangan; Pengendalian Internal; Keberlanjutan Bisnis*

PENDAHULUAN

UMKM hadir di hampir semua bidang ekonomi, mulai dari perdagangan, kuliner, jasa, kerajinan, sampai produksi rumahan. Usaha-usaha ini membuka lapangan kerja dan membantu perputaran uang di tingkat lokal, jadi wajar kalau keberlanjutannya selalu mendapat perhatian, terutama ketika persaingan pasar dan perkembangan teknologi

Naskah Masuk:01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 03 November 2026; Terbit: 28 November 2026

berjalan cepat. Kebijakan nasional juga menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat (Republik Indonesia, 2008; Republik Indonesia, 2021).

Ekonomi digital ikut mengubah cara UMKM menjalankan usahanya. Pelanggan sekarang tidak harus datang ke toko, karena mereka bisa memesan lewat media sosial, *marketplace*, atau layanan antar. Pembayaran pun semakin sering memakai transfer bank, dompet digital, dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Bagi pelaku usaha, hal ini membuat jangkauan pasar lebih luas dan transaksi lebih cepat, dan setiap pembayaran meninggalkan jejak yang bisa dicek kembali. Bank Indonesia (2025) mencatat bahwa pada akhir 2024 jumlah merchant QRIS mencapai 35,9 juta, dan 92,6 persen di antaranya adalah UMKM. Angka tersebut memperlihatkan bahwa UMKM sudah menjadi pemain utama dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Standar QRIS sendiri ditetapkan secara nasional oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2019, 2021).

Digitalisasi sebenarnya tidak berhenti pada alat pembayaran. Teknologi juga mengubah cara usaha menyimpan data, melayani pelanggan, mengatur pekerjaan, dan mengambil keputusan. Vial (2019) memandang transformasi digital sebagai perubahan organisasi yang dipicu oleh pemakaian teknologi digital, sementara Bharadwaj et al. (2013) menegaskan bahwa strategi digital kini menyatu dengan strategi bisnis. Bagi UMKM, langkah awalnya bisa sangat sederhana, misalnya memakai aplikasi kasir, *spreadsheet*, aplikasi pembukuan, *mobile banking*, atau sekadar menyimpan foto bukti transaksi.

Di sisi lain, kemudahan tersebut juga memunculkan persoalan baru. Ambil contoh penjualan lewat *marketplace*, yang disertai biaya administrasi, komisi, potongan promosi, ongkos kirim, dan jadwal pencairan dana yang tidak selalu sama. Jumlah pesanan yang naik belum tentu membuat kas ikut membaik. Pemilik perlu memastikan bahwa uang yang tercatat benar-benar sudah masuk ke rekening dan semua biayanya sudah dihitung. Kalau tidak dicatat dan dicek, data digital pun bisa saja keliru.

Masalah lain yang sering muncul pada usaha kecil adalah uang pribadi dan uang usaha yang bercampur. Hasil penjualan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga tanpa dicatat, atau jumlah penjualan dan pengeluaran hanya diingat-ingat. Akibatnya, pemilik sulit mengetahui laba yang sebenarnya, menentukan harga jual, menghitung kebutuhan modal kerja, dan menilai apakah usahanya berkembang. McKenzie dan Woodruff (2017) menunjukkan bahwa pencatatan, pengelolaan stok, dan perencanaan keuangan termasuk praktik bisnis yang berkaitan dengan kinerja dan daya tahan usaha kecil.

Arus kas perlu mendapat perhatian khusus. Sebuah usaha bisa saja mencatat keuntungan, tetapi tetap kesulitan membayar pemasok karena uang penjualan belum diterima, entah karena transaksinya secara kredit atau karena dana dari platform masih dalam proses pencairan. Oleh sebab itu, pemilik perlu membedakan laba dari kas yang tersedia. Laba menggambarkan hasil usaha dalam satu periode menurut prinsip akuntansi, sedangkan kas adalah uang yang benar-benar dapat dipakai untuk membayar kebutuhan operasional. Keputusan membeli bahan baku, menggaji pekerja, atau mengeluarkan dana lain sebaiknya mempertimbangkan saldo kas dan kewajiban yang segera jatuh tempo (Atrill & McLaney, 2022).

Kualitas keputusan usaha juga dipengaruhi oleh literasi keuangan. Pemilik perlu mampu menyusun anggaran, menghitung harga pokok, menilai keuntungan, membandingkan biaya pinjaman, mengelola utang, dan memperkirakan risiko. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan BPS

melaporkan indeks literasi keuangan nasional sebesar 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen dengan metode keberlanjutan (OJK & BPS, 2025). Angka ini menggambarkan masyarakat secara umum dan bukan khusus pelaku UMKM, tetapi cukup memberi gambaran bahwa pemahaman keuangan masih perlu diperkuat. Lusardi dan Mitchell (2014) juga menempatkan literasi keuangan sebagai bekal penting dalam mengambil keputusan ekonomi.

Layanan digital juga menuntut adanya pengendalian internal. Setiap transaksi perlu punya bukti, akses ke rekening dan aplikasi harus dibatasi, dan catatan penjualan harus sesuai dengan dana yang diterima. Kesalahan input, transaksi ganda, penipuan, perangkat yang hilang, kebocoran data, dan akun yang disalahgunakan dapat mengganggu keuangan usaha jika tidak diantisipasi. Kerangka COSO (2013) membagi pengendalian internal ke dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa teknologi keuangan, pengetahuan keuangan, dan akses pembiayaan saling berkaitan. Kurniasari et al. (2025) meneliti 469 UKM di Indonesia dan menemukan adanya keterkaitan antara literasi keuangan, adopsi teknologi finansial, akses pembiayaan, serta kinerja dan keberlanjutan usaha. Artinya, digitalisasi tidak cukup hanya dengan memasang aplikasi, tetapi juga mengubah cara UMKM mengelola informasi dan mengambil keputusan. Meski begitu, akses ke layanan keuangan tetap perlu disertai pemahaman tentang biaya, kewajiban, dan risikonya. OECD (2020) juga menekankan pentingnya pembiayaan yang sesuai bagi perkembangan usaha kecil dan menengah.

Digitalisasi UMKM, literasi keuangan, dan akses pembiayaan memang sudah banyak diteliti. Namun, pembahasan yang menyatukan pengelolaan arus kas, perencanaan anggaran, literasi keuangan, dan pengendalian internal dalam satu strategi manajemen keuangan digital masih jarang ditemukan. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut. Tujuannya bukan untuk mengukur pengaruh antarvariabel secara statistik, tetapi untuk menyintesiskan dari literatur bagaimana keempat unsur itu saling melengkapi dalam menopang keberlanjutan UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi literatur ini bertujuan (1) mengidentifikasi peran teknologi digital dalam pengelolaan keuangan UMKM; (2) menjelaskan keterkaitan antara pengelolaan arus kas, literasi keuangan, perencanaan anggaran, dan pengendalian internal; dan (3) merumuskan strategi terpadu yang dapat disesuaikan dengan skala dan kemampuan UMKM. Secara teoretis, kajian ini memperkaya pemahaman tentang cara empat unsur manajemen keuangan bekerja bersama dalam konteks digital. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi panduan bertahap bagi pelaku UMKM, lembaga pendamping, dan penyelenggara pelatihan.

KAJIAN TEORITIS

Manajemen Keuangan UMKM

Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, menggunakan, dan mengawasi dana supaya tujuan usaha tercapai. Di UMKM, cakupannya meliputi penerimaan dan pengeluaran, kebutuhan modal, pengendalian biaya, utang dan piutang, sampai evaluasi hasil usaha. Dengan pengelolaan yang baik, pemilik bisa menilai kondisi usahanya berdasarkan data yang tercatat dan tidak hanya dari perkiraan. Praktik yang sederhana pun sudah cukup berarti asalkan dijalankan secara teratur, karena membantu

pemilik mengetahui posisi keuangannya dan menghindari pemakaian dana tanpa rencana (McKenzie & Woodruff, 2017).

Prinsip dasarnya adalah memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha, karena dengan begitu pemilik tahu persis berapa dana yang dipakai untuk usaha. Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyediakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), yaitu pedoman pelaporan yang disederhanakan untuk entitas yang memenuhi kriteria. Standar ini bisa dijadikan acuan supaya informasi keuangan UMKM lebih tertib dan mudah dipahami, baik oleh pemilik maupun pihak lain yang berkepentingan.

Digitalisasi Manajemen Keuangan

Digitalisasi manajemen keuangan berarti memakai teknologi untuk mencatat, membayar, menyimpan bukti, menyusun laporan, dan memantau kondisi keuangan. Bentuknya beragam, antara lain aplikasi pembukuan, *spreadsheet*, aplikasi kasir, *mobile banking*, QRIS, dan layanan keuangan digital lainnya. Pencatatan manual jadi berkurang, dan pemilik dapat melihat ringkasan transaksi untuk periode tertentu. OECD (2021) mencatat bahwa teknologi digital membuka peluang bagi UKM untuk memperbaiki proses bisnisnya, tetapi sejauh mana peluang itu dimanfaatkan masih dipengaruhi oleh kesiapan, keterampilan, biaya, dan kapasitas internal.

Manfaat digitalisasi paling terasa jika aplikasinya sesuai dengan kebutuhan usaha. UMKM tidak harus langsung memakai sistem yang rumit atau berbayar. Usaha mikro bisa memulai dari *spreadsheet* atau aplikasi sederhana, sedangkan usaha yang lebih besar dapat memakai sistem yang menghubungkan penjualan, persediaan, dan pembukuan. Hal terpenting adalah pencatatannya konsisten, mudah diperiksa, aman, dan bisa disalin sebagai cadangan. Pembayaran digital juga perlu dilihat dari sisi inklusi keuangan, karena akses ke layanan pembayaran memperluas pilihan transaksi dan memudahkan pengelolaan penerimaan (Demirgüç-Kunt et al., 2022; Suri & Jack, 2016).

Layanan keuangan digital tentu tidak lepas dari risiko, baik risiko operasional maupun keamanan. Sebelum memakai *fintech* atau pendanaan berbasis teknologi informasi, pelaku usaha perlu memeriksa legalitas penyelenggara, biaya, tenor, kewajiban pembayaran, dan perlindungan penggunanya. Di Indonesia, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi diatur antara lain dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 (OJK, 2024). Akses yang mudah tidak boleh membuat pemeriksaan risiko terlewat.

Pengelolaan Arus Kas dan Perencanaan Anggaran

Arus kas adalah aliran uang masuk dan keluar dalam satu periode. Uang masuk bisa berasal dari penjualan tunai, pelunasan piutang, tambahan modal, atau pinjaman, sedangkan uang keluar meliputi bahan baku, upah, sewa, listrik, transportasi, cicilan, dan biaya lainnya. Tujuan pengelolaannya cukup sederhana, yaitu memastikan dana cukup untuk menjalankan usaha dan membayar kewajiban tepat waktu. Memantau kas jangka pendek dan merencanakan keuangan juga termasuk kompetensi penting bagi pemilik usaha kecil (OECD, 2018).

Laba dan kas perlu dibedakan. Penjualan kredit dicatat sebagai pendapatan padahal uangnya belum diterima, sebaliknya pinjaman menambah saldo kas tetapi bukan pendapatan usaha. Karena itu, pencatatan penjualan dan pencatatan penerimaan kas dipisahkan. Proyeksi arus kas dapat disusun per minggu atau per bulan dengan memasukkan perkiraan penerimaan, jadwal pembayaran ke pemasok, upah, sewa, cicilan,

dan kewajiban lain. Dari proyeksi itu, pemilik bisa melihat adanya kekurangan dana sebelum benar-benar terjadi.

Anggaran adalah rencana penggunaan dana untuk periode tertentu. Di UMKM, pos-posnya bisa meliputi bahan baku, tenaga kerja, biaya operasional, pemasaran, transportasi, administrasi, dan dana cadangan. Realisasi pengeluaran dibandingkan dengan anggaran agar penyimpangan cepat terlihat dan perbaikan bisa segera dilakukan. Anggaran tidak harus rumit. Cukup memuat kebutuhan utama, batas pengeluaran, dan urutan prioritas pembayaran. Perencanaan yang disiplin juga membuat penilaian kebutuhan pembiayaan eksternal menjadi lebih rasional (OECD, 2020; Atrill & McLaney, 2022).

Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan memahami informasi dan konsep keuangan, lalu memakainya untuk mengambil keputusan yang tepat. Bagi UMKM, hal ini mencakup anggaran, harga pokok produksi, laba, arus kas, bunga, risiko pinjaman, tabungan usaha, dan pengelolaan modal. Pemilik yang menguasainya lebih mudah menilai apakah suatu keputusan menopang usaha atau malah menambah beban. Lusardi dan Mitchell (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan keuangan membantu orang mengambil keputusan ekonomi, dan Drexler et al. (2014) menunjukkan bahwa pelatihan keuangan yang sederhana dapat memperbaiki praktik keuangan pelaku usaha mikro.

Literasi keuangan semakin penting ketika pelaku UMKM memakai layanan *fintech* atau mengajukan pembiayaan. Sebelum meminjam, pemilik perlu memeriksa legalitas penyedia, dana yang benar-benar diterima, biaya administrasi, bunga atau imbal hasil, tenor, denda, dan jadwal pembayaran. Pinjaman sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif yang manfaat dan kemampuan pengembaliannya sudah dihitung. Akses pembiayaan yang baik membantu usaha tumbuh, tetapi terbatasnya akses dan mahalnya biaya pembiayaan masih menjadi kendala bagi sebagian usaha kecil (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006; Beck et al., 2008).

Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah proses yang membantu menjaga aset, meningkatkan keandalan informasi, memastikan kegiatan sesuai prosedur, dan mengurangi kesalahan maupun penyalahgunaan. COSO (2013) menguraikan lima komponennya, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen ini bisa diterapkan secara sederhana di UMKM, bahkan jika usaha belum punya bagian keuangan sendiri.

Dalam praktiknya, lingkungan pengendalian dibangun lewat pembagian tanggung jawab antara pemilik dan pekerja, kebiasaan jujur, serta aturan pemakaian uang usaha. Penilaian risiko berarti mengenali kemungkinan kas hilang, salah catat, pelanggan terlambat membayar, penipuan digital, dan akun yang bocor. Aktivitas pengendalian dapat berupa menyimpan bukti transaksi, membatasi akses aplikasi, meminta persetujuan untuk pengeluaran tertentu, dan mencocokkan catatan dengan mutasi rekening. Pada komponen informasi dan komunikasi, pemilik dan pekerja harus paham cara mencatat transaksi, melaporkan masalah, dan menyimpan dokumen. Terakhir, pemantauan dilakukan dengan memeriksa kas, rekening, persediaan, piutang, dan laporan keuangan secara berkala.

Pada usaha dengan jumlah pekerja yang sedikit, pemisahan tugas secara penuh sering kali tidak mungkin dilakukan. Meski begitu, pemilik tetap dapat menambah lapisan

pemeriksaan, misalnya dengan meminta pegawai atau anggota keluarga yang dipercaya untuk meninjau rekap transaksi dan mutasi rekening. Pengendalian yang sederhana pun berguna selama dijalankan secara konsisten. Untuk transaksi digital, kata sandi yang kuat, autentikasi tambahan, larangan membagikan PIN dan kode OTP, kunci perangkat, serta pencadangan data perlu menjadi bagian dari pengendalian.

Keberlanjutan Bisnis UMKM

Keberlanjutan bisnis adalah kemampuan usaha untuk mempertahankan operasional, memenuhi kewajiban, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan tetap memberi manfaat dalam jangka panjang. Dari sisi keuangan, ukurannya antara lain likuiditas yang terjaga, biaya yang terkendali, laba yang wajar, utang yang terkelola, dan dana untuk kebutuhan ke depan. Kemampuan mempertahankan pelanggan dan menyesuaikan produk dengan pasar juga ikut menentukan. Dukungan pembiayaan dan praktik manajemen yang baik merupakan bagian dari lingkungan yang memungkinkan usaha kecil berkembang (Ayyagari et al., 2007; Bruhn & Zia, 2013).

Penjualan yang naik belum tentu berarti usaha dalam kondisi sehat. Jika biaya operasional tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, atau uang hasil penjualan belum diterima, kas bisa tertekan. Karena itu, keberlanjutan perlu dibangun lewat pengelolaan keuangan yang terencana dan keputusan yang bersandar pada informasi yang dapat dipercaya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini memandang manajemen keuangan digital sebagai cara untuk membantu UMKM menghasilkan dan mengelola informasi keuangan dengan lebih tertib. Pencatatan transaksi digital menjadi dasar bagi pengelolaan arus kas dan penyusunan anggaran. Literasi keuangan dibutuhkan supaya pemilik mampu membaca informasi tersebut dan memakainya dalam mengambil keputusan, sedangkan pengendalian internal menjaga keandalan catatan, keamanan dana, dan ketaatan pada prosedur. Keempatnya kemudian menopang keberlanjutan bisnis lewat likuiditas yang lebih kuat, biaya yang lebih efisien, risiko yang lebih terkelola, dan operasional yang tetap berjalan. Kerangka ini bersifat konseptual dan dipakai sebagai pemandu sintesis literatur, bukan sebagai model sebab-akibat yang diuji secara statistik.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 1 merangkum beberapa penelitian terdahulu tentang literasi keuangan, praktik bisnis, teknologi keuangan, dan akses pembiayaan usaha kecil. Penelitian-penelitian ini dipilih karena terbit di jurnal bereputasi dan menjadi landasan empiris bagi keempat unsur strategi yang dikaji.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil

1.	Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint	Beck & Demirgüç-Kunt	2022	Keterbatasan akses pembiayaan ternyata menjadi hambatan pertumbuhan yang lebih berat bagi usaha kecil dan menengah daripada bagi perusahaan besar, sehingga pembiayaan yang sesuai perlu dipandang sebagai bagian dari lingkungan yang mendukung keberlanjutan usaha.
2.	Stimulating Managerial Capital in Emerging Markets: The Impact of Business Training for Young Entrepreneurs	Bruhn & Zia	2013	Pelatihan bisnis meningkatkan pengetahuan dan praktik bisnis peserta. Dampaknya pada kinerja usaha lebih terbatas dan cenderung lebih terlihat pada peserta yang sudah memiliki pemahaman keuangan yang lebih baik.
3.	The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence	Lusardi & Mitchell	2014	Pengetahuan keuangan berkaitan dengan kualitas keputusan ekonomi, seperti perencanaan dan pengelolaan dana, sedangkan tingkat literasi keuangan di banyak negara masih tergolong rendah.
4.	Keeping It Simple: Financial Literacy and Rules of Thumb	Drexler, Fischer & Schoar	2014	Pelatihan keuangan yang sederhana dan berbasis kaidah praktis (*rules of thumb*) dapat memperbaiki praktik pengelolaan keuangan pelaku usaha mikro, serta lebih mudah diterapkan daripada pelatihan akuntansi yang bersifat standar.
5.	The Long-Run Poverty and Gender Impacts of Mobile Money	Suri & Jack	2015	Akses terhadap layanan uang elektronik (*mobile money*) berdampak positif jangka panjang pada kesejahteraan rumah tangga dan memperluas pilihan transaksi, dengan manfaat yang lebih besar pada rumah tangga yang dikepalai perempuan.

6.	Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions	Gomber, Koch & Siering	2017	Penelitian ini memetakan kajian keuangan digital ke dalam beberapa bidang dan menegaskan bahwa kajian tentang penggunaan layanan keuangan digital oleh pelaku usaha kecil masih perlu diperkuat.
7.	Business Practices in Small Firms in Developing Countries	McKenzie & Woodruff	2017	Praktik bisnis yang lebih baik, termasuk pencatatan, pengelolaan stok, dan perencanaan keuangan, berkaitan dengan kinerja dan keberlangsungan usaha kecil, sementara banyak usaha kecil belum menerapkannya secara memadai.
8.	Unraveling the Impact of Financial Literacy, Financial Technology Adoption, and Access to Finance on Small Medium Enterprises Business Performance and Sustainability: A Serial Mediation Model	Kurniasari, Abd Hamid & Lestari	2025	Penelitian terhadap 469 UKM di Indonesia ini menemukan keterkaitan antara literasi keuangan, adopsi teknologi finansial, akses pembiayaan, serta kinerja dan keberlanjutan usaha melalui model mediasi serial.

Sumber: diolah penulis dari artikel-artikel yang tercantum dalam Daftar Pustaka.

Tabel 1 memperlihatkan tiga pola. Pertama, kemampuan keuangan pemilik, baik berupa literasi maupun kebiasaan mencatat, secara konsisten dikaitkan dengan mutu keputusan dan daya tahan usaha (Lusardi & Mitchell, 2014; McKenzie & Woodruff, 2017). Kedua, teknologi keuangan dan akses pembiayaan memang memperluas peluang usaha, tetapi manfaatnya bergantung pada kemampuan penggunanya (Suri & Jack, 2016; Kurniasari et al., 2025). Ketiga, pelatihan yang sederhana dan praktis lebih mudah diterapkan daripada yang rumit (Drexler et al., 2014; Bruhn & Zia, 2013). Meski begitu, kebanyakan studi hanya membahas satu atau dua unsur secara terpisah. Kajian yang mengaitkan arus kas, anggaran, literasi keuangan, dan pengendalian internal dalam satu strategi manajemen keuangan digital masih terbatas, dan celah inilah yang coba diisi oleh penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena yang ingin diperoleh adalah pemahaman tentang konsep, pola, dan keterkaitan antara manajemen keuangan digital, arus kas, literasi keuangan, anggaran, pengendalian internal, dan keberlanjutan UMKM. Peneliti menelaah sumber tertulis yang relevan, membandingkannya, lalu menyintesiskannya menjadi pemahaman yang utuh tentang strategi manajemen keuangan digital. Cara ini cocok untuk menyusun pemahaman konseptual dari penelitian terdahulu tanpa harus mengumpulkan data lapangan (Snyder, 2019).

Data yang dipakai adalah data sekunder berupa artikel ilmiah, publikasi lembaga resmi, pedoman akuntansi, peraturan, buku akademik, dan kerangka konseptual yang relevan. Sumber yang ditelaah mencakup publikasi Bank Indonesia tentang QRIS, hasil SNLIK OJK dan BPS, kerangka kompetensi literasi keuangan UMKM dari OECD, SAK EMKM dari Ikatan Akuntan Indonesia, kerangka pengendalian internal COSO, publikasi OECD dan World Bank tentang pembiayaan dan digitalisasi UMKM, peraturan pemerintah, serta artikel ilmiah tentang literasi keuangan, adopsi *fintech*, praktik manajemen, dan kinerja usaha kecil. Jumlah seluruhnya 30 sumber, terdiri atas 13 artikel jurnal, 3 buku akademik, 9 publikasi lembaga atau organisasi, dan 5 peraturan atau ketentuan resmi, yang terbit antara tahun 2006 dan 2025.

Sumber dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan publikasi yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Kriteria pemilihannya adalah relevansi isi, kredibilitas penerbit, kebaruan, kesesuaian dengan fokus penelitian, dan identitas bibliografis (misalnya DOI atau tautan resmi) yang dapat ditelusuri. Sumber yang tidak memiliki penerbit atau penulis yang jelas tidak dipakai. Informasi dari tiap sumber dicatat berdasarkan pokok bahasan, identitas, konsep utama, dan temuan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, lalu dikelompokkan ke dalam tema digitalisasi keuangan, arus kas, literasi keuangan, anggaran, pengendalian internal, dan keberlanjutan usaha.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi dan sintesis deskriptif dengan enam langkah, yaitu (1) identifikasi informasi yang relevan dari setiap sumber; (2) reduksi, yakni memilih informasi yang sesuai dengan fokus dan menyisihkan yang tidak; (3) kategorisasi ke dalam tema digitalisasi keuangan, arus kas, literasi keuangan, anggaran, pengendalian internal, dan keberlanjutan UMKM; (4) perbandingan persamaan, perbedaan, dan hubungan temuan antarsumber; (5) sintesis temuan menjadi rumusan strategi yang saling berkaitan; dan (6) penarikan kesimpulan dari pola yang muncul. Alur ini sejalan dengan model analisis data kualitatif Miles et al. (2020), sedangkan perbandingan antarsumber dipakai untuk memperkuat ketepatan interpretasi (Patton, 2015).

Penelitian ini tidak melibatkan wawancara, observasi langsung, maupun survei kepada pelaku UMKM. Karena itu, pembahasan dan kesimpulannya bertumpu pada literatur yang ditelaah dan tidak dimaksudkan sebagai gambaran empiris seluruh UMKM di Indonesia. Besarnya pengaruh tiap komponen terhadap keberlanjutan usaha juga tidak diukur. Strategi yang diusulkan perlu disesuaikan dengan sektor usaha, skala kegiatan, sumber daya, dan kondisi masing-masing pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 30 sumber yang ditelaah, benang merahnya cukup jelas: manajemen keuangan digital menopang keberlanjutan UMKM jika dibangun sebagai satu rangkaian yang terpadu, yaitu pencatatan digital, pengelolaan arus kas dan anggaran, literasi keuangan, serta pengendalian internal. Pembahasan berikut mengikuti urutan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan model strategi terpadu, ilustrasi penerapan, serta tantangan dan cara mengatasinya.

Pembahasan dimulai dari digitalisasi. Literatur menunjukkan bahwa teknologi dapat memperbaiki administrasi keuangan UMKM lewat pencatatan yang lebih cepat, bukti pembayaran yang tersimpan, dan ringkasan penerimaan serta pengeluaran yang siap dilihat. QRIS dan transfer digital membuat setiap transaksi punya jejak yang dapat diperiksa lagi, sehingga pemilik tahu dari mana uang masuk dan tidak terlalu bergantung pada catatan manual. Meluasnya penggunaan QRIS di kalangan UMKM memperlihatkan arah tersebut (Bank Indonesia, 2025). Secara lebih luas, digitalisasi

membuka peluang bagi usaha kecil untuk memperbaiki proses dan menjangkau pelanggan, walaupun kesiapan teknologi dan keterampilan tetap menentukan (OECD, 2021; Vial, 2019).

Namun, alat digital tidak otomatis membuat laporan keuangan menjadi benar. Transaksi yang lupa dimasukkan, kategori biaya yang keliru, atau dana platform yang dianggap sudah diterima padahal belum cair akan menghasilkan laporan yang menyesatkan. Pemilik perlu mencocokkan catatan penjualan, laporan platform, dan mutasi rekening, sebab teknologi baru dapat dipercaya jika disertai prosedur pencatatan dan pemeriksaan. Pembayaran digital memang memperluas akses dan memudahkan transaksi, tetapi pemilik tetap harus memahami cara kerja layanan dan risikonya (Demirgüç-Kunt et al., 2022; Gomber et al., 2017).

Untuk arus kas dan anggaran, titik awalnya adalah mencatat semua penerimaan dan pengeluaran. Setelah itu, pemilik dapat menyusun proyeksi kas mingguan atau bulanan berdasarkan jadwal penjualan, pembelian bahan baku, upah, sewa, cicilan, dan kewajiban lain. Proyeksi tersebut menunjukkan kapan dana berlebih dan kapan kas berpotensi kurang. Bentuk yang paling sederhana cukup membandingkan saldo awal, perkiraan penerimaan, perkiraan pengeluaran, dan saldo akhir pada tiap periode.

Anggaran disusun menurut kebutuhan utama, seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya operasional, pemasaran, transportasi, administrasi, dan dana cadangan, lalu realisasi pengeluaran dibandingkan dengan anggaran tersebut. Jika biaya promosi naik tetapi penjualan tidak naik sebanding, pemilik bisa menilai ulang efektivitas promosinya. Kontrol semacam ini mencegah kenaikan penjualan yang diikuti pemborosan. Pemahaman tentang pembiayaan eksternal juga diperlukan agar kewajiban tidak melampaui kemampuan arus kas (OECD, 2020; Beck & Demirgüç-Kunt, 2006). Persediaan pun berhubungan dengan kas: stok yang berlebih menahan dana dalam bentuk barang dan menambah risiko rusak atau tidak laku, sedangkan stok yang terlalu sedikit membuat penjualan hilang. Oleh karena itu, pembelian perlu mempertimbangkan kecepatan penjualan, kebutuhan pelanggan, dan waktu pengiriman dari pemasok, sebagai bagian dari praktik manajemen usaha kecil yang berkaitan dengan produktivitas dan daya tahan (McKenzie & Woodruff, 2017).

Pada literasi keuangan, informasi dari aplikasi harus dipahami lebih dulu sebelum dijadikan dasar keputusan. Laporan penjualan mungkin menunjukkan produk terlaris, tetapi jumlah terjual saja tidak cukup. Biaya bahan baku, kemasan, komisi platform, promosi, ongkos kirim, dan biaya operasional perlu dihitung untuk mengetahui keuntungan per produk. Dengan begitu, pemilik dapat membedakan produk yang ramai terjual dari produk yang margin keuntungannya memang memadai.

Literasi keuangan juga membantu pemilik menilai apakah pembiayaan dari lembaga keuangan atau *fintech* sesuai dengan kebutuhan usaha. Kurniasari et al. (2025) menemukan bahwa literasi keuangan berkaitan dengan penggunaan teknologi finansial dan akses pembiayaan pada UKM di Indonesia. Dengan pemahaman yang memadai, pelaku usaha dapat menghindari pinjaman yang melebihi kemampuan membayar. Drexler et al. (2014) juga memperlihatkan bahwa materi literasi yang praktis dan mudah diterapkan dapat memperbaiki kebiasaan keuangan pelaku usaha mikro. Terkait kebutuhan modal, International Finance Corporation (2017) memetakan kesenjangan pembiayaan UMKM dan menegaskan bahwa kebutuhan modal usaha kecil belum sepenuhnya terpenuhi oleh pembiayaan formal. Data SNLIK 2025 juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan nasional lebih tinggi daripada literasinya. Data tersebut memang tidak khusus menggambarkan UMKM, tetapi

mengingatkan bahwa kemudahan akses perlu dibarengi pemahaman tentang manfaat, biaya, dan risiko (OJK & BPS, 2025). Akses tanpa pemahaman dapat membuat pelaku usaha mengambil produk yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga edukasi keuangan perlu berjalan seiring dengan perluasan layanan digital.

Karena transaksinya digital, pengendalian internal juga harus mencakup keamanan perangkat dan akun. Pemilik sebaiknya memakai kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi tambahan bila tersedia, tidak membagikan PIN atau kode OTP, dan membatasi akses aplikasi keuangan hanya untuk pihak yang berkepentingan. Perangkat yang dipakai untuk transaksi dilindungi dengan kunci layar dan diperbarui secara berkala. Akun khusus usaha juga mengurangi risiko tercampurnya transaksi pribadi dan usaha.

Selain keamanan akun, transaksi dikendalikan dengan menyimpan bukti penerimaan dan pengeluaran, memberi kategori pada setiap transaksi, dan menetapkan batas pengeluaran yang perlu persetujuan pemilik. Pada akhir hari atau akhir minggu, catatan penjualan dicocokkan dengan uang tunai, saldo rekening, dan laporan penyedia pembayaran. Jika ada selisih, penyebabnya ditelusuri lebih dulu sebelum dilakukan pencatatan penyesuaian. Langkah ini merupakan penerapan aktivitas pengendalian dan pemantauan dalam kerangka COSO (2013). Kelima komponen COSO bisa diterapkan secara sederhana di UMKM, yaitu pemilik menetapkan tanggung jawab, mengenali risiko utama, memeriksa transaksi, memastikan informasi tersedia, dan melakukan pemantauan. Bila pemilik merangkap beberapa fungsi, pemeriksaan silang secara berkala oleh orang yang dipercaya dapat menutupi kekurangan tersebut. Peraturan tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi juga mengingatkan pentingnya memahami risiko ketika UMKM memakai pembiayaan digital (OJK, 2024).

Dari keterkaitan antarkonsep tersebut, strategi manajemen keuangan digital bagi UMKM perlu dipandang sebagai satu rangkaian kegiatan. Pencatatan digital menyediakan informasi yang kemudian dipakai untuk menyusun anggaran dan proyeksi arus kas. Literasi keuangan membantu pemilik memahami hasil pencatatan dan menentukan langkah, sementara pengendalian internal menjaga agar transaksi, data, dan dana dapat dipercaya. Evaluasi berkala lalu memperbaiki rencana keuangan untuk periode berikutnya.

Tabel 2. Ringkasan keterkaitan keempat komponen disajikan pada

Komponen	Fungsi dan Strategi	Praktik Utama	Risiko bila diabaikan	Rujukan
Pencatatan digital	Menyediakan data transaksi yang tertib sebagai dasar informasi keuangan	Memisahkan dana pribadi dan usaha; mencatat transaksi harian; menyimpan bukti secara digital	Laba tidak diketahui secara pasti; informasi menyesatkan	IAI (2016); McKenzie & Woodruff (2017); OECD (2021)
Arus kas dan anggaran	Memperkirakan ketersediaan dana dan menetapkan	Proyeksi kas mingguan atau bulanan; membandingkan	Kekurangan kas meski usaha mencatat laba; utang melebihi	OECD (2018, 2020); Atrill &

	prioritas penggunaan	anggaran dengan realisasi	kemampuan bayar	McLaney (2022)
Literasi keuangan	Memampukan pemilik menafsirkan informasi dan menilai pilihan pembiayaan	Menghitung margin per produk; membandingkan biaya, tenor, dan risiko pinjaman	Keputusan pinjaman dan harga yang tidak tepat	Lusardi & Mitchell (2014); Drexler et al. (2014); Kurniasari et al. (2025)
Pengendalian internal	Menjaga keandalan catatan, keamanan dana, dan kepatuhan prosedur	Rekonsiliasi; pembatasan akses akun; persetujuan pengeluaran; pencadangan data	Salah input, penipuan, penyalahgunaan akun, kehilangan data	COSO (2013); OJK (2024)

Sumber: sintesis penulis berdasarkan literatur yang ditelaah.

Keempat komponen itu tidak berdiri sendiri. Data transaksi dari pencatatan digital baru berguna kalau pemilik mampu mengelompokkan dan memeriksanya. Arus kas memakai data penerimaan dan pengeluaran untuk memperkirakan ketersediaan dana, sedangkan anggaran menetapkan prioritas pemakaiannya. Literasi keuangan membuat pemilik mampu menafsirkan informasi, menghitung biaya, dan menimbang pilihan pembiayaan, dan pengendalian internal memastikan transaksi berbukti, akses terlindungi, serta catatan sesuai dengan kenyataan. Bila keempatnya terhubung, ketidakpastian keuangan berkurang dan keputusan menjadi lebih terukur. Dalam kajian ini, keberlanjutan UMKM dilihat dari beberapa aspek, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, kestabilan arus kas, pengendalian biaya, pengelolaan utang dan piutang, ketersediaan modal kerja, dan kemampuan mempertahankan kegiatan usaha. Aspek-aspek tersebut menjadi sudut pandang analisis literatur dan bukan indikator yang diukur langsung pada responden.

Penerapan strategi terpadu ini dapat dilakukan dalam lima tahap seperti pada Tabel 3. Tahap-tahap tersebut disusun berurutan supaya bisa disesuaikan dengan kemampuan UMKM yang berbeda-beda.

Tabel 3. Tahapan penerapan strategi manajemen keuangan digital bagi UMKM

Tahap	Kegiatan	Keluaran	Komponen
1.	Memisahkan keuangan pribadi dan usaha melalui rekening atau tempat penyimpanan dana yang berbeda. Setiap pengambilan uang oleh pemilik dicatat sebagai pengambilan pribadi, bukan biaya operasional.	Rekening usaha; catatan pengambilan pemilik	Pencatatan
2.	Mencatat seluruh transaksi secara rutin, termasuk penjualan tunai dan digital, pembelian bahan baku, biaya operasional, utang, piutang, dan pengambilan pemilik. Bukti transaksi disimpan secara fisik atau digital.	Buku kas harian; arsip bukti transaksi	Pencatatan

3.	Menyusun anggaran dan proyeksi arus kas. Pemilik mencatat perkiraan penerimaan dan pengeluaran, kemudian menandai kewajiban yang memiliki tanggal pembayaran tertentu.	Anggaran bulanan; proyeksi kas	Arus kas dan anggaran
4.	Melakukan pengendalian dan rekonsiliasi. Catatan penjualan dicocokkan dengan saldo kas, mutasi rekening, dan laporan penyedia pembayaran. Akses akun dibatasi dan data dicadangkan secara berkala.	Laporan rekonsiliasi; salinan data	Pengendalian internal
5.	Mengevaluasi kinerja keuangan setiap bulan dengan meninjau penjualan, laba, biaya, arus kas, persediaan, piutang, dan kewajiban, kemudian menentukan perbaikan yang perlu dilakukan.	Ringkasan kinerja bulanan; rencana perbaikan	Literasi keuangan

Sumber: sintesis penulis berdasarkan literatur yang ditelaah.

Sebagai gambaran, bayangkan sebuah usaha makanan rumahan yang menerima pesanan lewat toko langsung, media sosial, dan *marketplace*. Pemiliknya memakai rekening khusus usaha dan aplikasi pembukuan sederhana. Penjualan dicatat per saluran, sedangkan pengeluaran untuk bahan baku, kemasan, gas, listrik, dan komisi platform dimasukkan ke kategori yang berbeda, sehingga pendapatan bersih tiap saluran bisa dibandingkan. Setiap akhir pekan, jumlah pesanan dicocokkan dengan dana yang sudah masuk ke rekening. Pesanan *marketplace* yang belum cair dicatat sebagai penerimaan dalam proses, bukan sebagai kas yang sudah tersedia.

Setelah itu, pemilik memperkirakan kebutuhan dana untuk bahan baku dan biaya rutin. Kalau kas diperkirakan kurang, ia dapat menggeser pembelian yang belum mendesak atau menyiapkan pembiayaan yang biaya dan risikonya sudah dipahami. Ilustrasi ini bukan hasil wawancara atau observasi lapangan, tetapi contoh penerapan dari sintesis literatur, dan dapat disesuaikan untuk usaha dagang, jasa, kerajinan, maupun produksi rumahan.

Meskipun dapat dijalankan secara bertahap, strategi ini tetap menghadapi tantangan, yang dirangkum bersama cara mengatasinya pada Tabel 4. UMKM tidak perlu memakai banyak aplikasi sekaligus. Pilihan teknologi sebaiknya mempertimbangkan kemudahan, biaya, keamanan, dukungan teknis, dan kemampuan mengekspor serta menyimpan data. Prosedur sederhana yang dijalankan rutin lebih berguna daripada sistem rumit yang akhirnya tidak dipakai.

Tabel 4. Tantangan penerapan dan upaya mengatasinya

Tantangan	Upaya Mengatasi	Rujukan
Keterbatasan kemampuan digital	Memilih aplikasi sederhana dan memberikan pelatihan singkat kepada pemilik maupun pekerja, dimulai dari memasukkan transaksi, mengelompokkan biaya, membaca ringkasan keuangan, dan menyimpan bukti pembayaran.	Drexler et al. (2014); OECD (2021)

Biaya aplikasi	Memulai dari layanan gratis atau berbiaya rendah yang sudah memenuhi kebutuhan pencatatan, lalu membandingkan manfaat dengan biaya langganan, perangkat, dan waktu pengoperasian.	OECD (2021)
Kesalahan data	Mencatat pada hari yang sama, memakai kategori transaksi yang konsisten, memeriksa secara berkala, dan menetapkan satu sumber pencatatan utama.	COSO (2013)
Risiko keamanan	Menggunakan kata sandi yang kuat, autentikasi tambahan, pembatasan akses, kewaspadaan terhadap tautan atau pesan palsu, serta pencadangan data secara berkala.	COSO (2013); OJK (2024)
Ketergantungan pada platform	Menyimpan salinan data dan tetap memiliki catatan transaksi yang dapat diakses mandiri; memahami biaya layanan, jadwal pencairan, mekanisme pengaduan, dan ketentuan penyedia platform.	Gomber et al. (2017); Demirgüç-Kunt et al. (2022)

Sumber: sintesis penulis berdasarkan literatur yang ditelaah.

KESIMPULAN

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa manajemen keuangan digital dapat menopang keberlanjutan UMKM melalui pencatatan transaksi yang lebih teratur, pemantauan penerimaan dan pengeluaran yang lebih mudah, serta informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Meski begitu, teknologi saja belum menjamin keuangan usaha menjadi sehat. Manfaatnya bergantung pada disiplin mencatat, kemampuan pemilik memahami informasi keuangan, dan penerapan pengendalian internal. Karena itu, digitalisasi perlu dipahami sebagai bagian dari tata kelola keuangan dan tidak sekadar pemakaian alat bayar atau aplikasi.

Pengelolaan arus kas menjaga ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dan kewajiban. Perencanaan anggaran menentukan prioritas pemakaian dana sekaligus mengendalikan pengeluaran. Literasi keuangan membantu pemilik memahami biaya, laba, utang, pembiayaan, dan risiko layanan digital, sedangkan pengendalian internal menjaga keamanan dana, ketertiban transaksi, dan keandalan catatan. Keempatnya perlu dihubungkan supaya keputusan usaha tidak hanya mengejar kenaikan penjualan, tetapi juga memperhitungkan kondisi kas dan kemampuan memenuhi kewajiban.

Langkah yang realistis dimulai dari memisahkan keuangan pribadi dan usaha, mencatat transaksi harian, menyusun proyeksi kas, memantau anggaran, merekonsiliasi transaksi digital, membatasi akses akun, mencadangkan data, dan mengevaluasi kinerja setiap bulan. Karena penelitian ini berupa studi literatur, strategi tersebut masih bersifat konseptual dan perlu diuji lewat penelitian lapangan.

Dari sisi praktis, pelaku UMKM disarankan membiasakan diri mencatat transaksi setiap hari, memeriksa kas dan rekening secara rutin, serta membuat anggaran sederhana dan proyeksi kas. Lembaga pendamping, perguruan tinggi, dan komunitas usaha diharapkan memberi pelatihan yang tidak berhenti pada pengenalan aplikasi, tetapi juga mengajarkan cara menyusun anggaran, membaca laporan, menghitung biaya, dan menilai pembiayaan. Pemerintah dan penyedia layanan keuangan perlu memperluas edukasi tentang keamanan transaksi digital, perlindungan konsumen, dan transparansi biaya, disertai pendampingan agar teknologi yang diperkenalkan benar-benar dipakai. Penelitian

selanjutnya dapat melakukan wawancara atau observasi pada pelaku UMKM dari beberapa sektor, serta membandingkan usaha yang sudah memakai aplikasi keuangan dengan usaha yang masih mencatat secara manual.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Ayyagari, M., Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2007). Small and medium enterprises across the globe. *Small Business Economics, 29*, 415–434. https://doi.org/10.1007/s11187-006-9002-5

Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance, 30*(11), 2931–2943. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Martinez Peria, M. S. (2008). Banking services for everyone? Barriers to bank access and use around the world. *The World Bank Economic Review, 22*(3), 397–430. https://doi.org/10.1093/wber/lhn020

Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly, 37*(2), 471–482. https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37:2.3

Bruhn, M., & Zia, B. (2013). Stimulating managerial capital in emerging markets: The impact of business training for young entrepreneurs. *Journal of Development Effectiveness, 5*(2), 232–266. https://doi.org/10.1080/19439342.2013.780090

Drexler, A., Fischer, G., & Schoar, A. (2014). Keeping it simple: Financial literacy and rules of thumb. *American Economic Journal: Applied Economics, 6*(2), 1–31. https://doi.org/10.1257/app.6.2.1

Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics, 87*, 537–580. https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x

Kurniasari, F., Abd Hamid, N., & Lestari, E. D. (2025). Unraveling the impact of financial literacy, financial technology adoption, and access to finance on small medium enterprises business performance and sustainability: A serial mediation model. *Cogent Business & Management, 12*(1), Article 2487837. https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2487837

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

McKenzie, D., & Woodruff, C. (2017). Business practices in small firms in developing countries. *Management Science, 63*(9), 2967–2981. https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2492

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Suri, T., & Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. *Science, 354*(6317), 1288–1292. https://doi.org/10.1126/science.aah5309

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems, 28*(2), 118–144. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003

Buku Teks

Atrill, P., & McLaney, E. (2022). *Accounting and finance for non-specialists* (12th ed.). Pearson.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi

Bank Indonesia. (2025). *Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia tahun 2024*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/LKTBI-2024.pdf

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Ikatan Akuntan Indonesia.

International Finance Corporation. (2017). *MSME finance gap: Assessment of the shortfalls and opportunities in financing micro, small and medium enterprises in emerging markets*. World Bank Group. https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doclink/2018/msme-finance-gap-report.pdf

OECD. (2018). *OECD/INFE core competencies framework on financial literacy for MSMEs*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/220101c9-en

OECD. (2020). *Financing SMEs and entrepreneurs 2020: An OECD scoreboard*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/061fe03d-en

OECD. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025, 2 Mei). *Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat: Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx

Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Resmi

Bank Indonesia. (2019). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx

Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang perubahan atas ketentuan implementasi standar nasional QR Code untuk pembayaran*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_230821.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/uu-no-7-tahun-2021